



**PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, S1

Oleh:

Vina Rohmatul Umah
(3301415033)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jum'at*
Tanggal : *12 Juli 2013*

Pembimbing I



Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Mengetahui,
Ketua Jurusan PKn



UNNES Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019

Penguji I



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197610112006041002

Penguji II



Novia Wahyu Wardhani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198811022015042001

Penguji III



Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

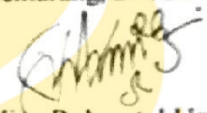


Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196211201987021001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 29 Juli 2019


Vina Rohmatul Umah
NIM.3301415033



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Barang siapa yang menegrjakan amal saleh baik lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami berikan balasan kepada mereka di akherat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl ayat 97).

Persembahan

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Bapak Abdul Khamid dan Ibu Rustini yang tiada henti memberikan doa, semangat, dan dukungannya dalam menjalankan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Adikku terkasih Zumrotul Aliyah yang tiada henti memberikan doa dan semangat.
3. Teman – teman The Little Family yang selalu setia menemani dalam suka dan duka.
4. Teman – teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2015 Jurusan Politik Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah berjuang bersama – sama dalam susah dan senang.
5. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang dengan judul “Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo”.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di UNNES.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang sekaligus selaku Dosen Wali yang selama ini telah memberikan arahan kepada penulis dalam segala kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan penulis.
4. Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing yang selama ini telah memberikan masukan dan ilmu dalam proses pengerjaan skripsi penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Novia Wahyu Wardhani selaku dosen penguji 2 yang juga turut memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Bapak Abdul Khamid dan Ibu Rustini atas segala perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, perjuangan, dan doa yang tiada henti – hentinya demi kesuksesan dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Sahabat Little Family, Heni Nur Anisa, Linda Ratna Ratri, Sri Rahayu, Apita Listiyani, Diego Oppa, dan Wahyu yang berbahagia.
10. Teman – teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2015 yang sudah kebersamai dalam segala aktivitas perkuliahan.
11. Keluarga HIMA PKN UNNES 2016 yang sudah memberikan banyak pengalaman, kesan dan pelajaran baik bagi penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Semarang, 29 Juli 2019



Vina Rohmatul Umah
NIM: 3301415033

SARI

Umah, Vina Rohmatul. 2019. Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. Puji Lestari, S.Pd.M.Si. 130 hal.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kader Perempuan, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Reformasi bangsa Indonesia 1998 telah membawa perubahan baru bagi sistem politik Indonesia. Salah satunya adalah dijaminnya hak asasi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam bidang politik. Kendati demikian, partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah karena berbagai macam faktor seperti budaya patriarki dan stereotip. Partisipasi politik perempuan dapat ditingkatkan melalui suatu lembaga yang disebut partai politik. Berdasarkan data DPRD Kabupaten Wonosobo, hanya terdapat 3 perempuan dari total 42 anggota DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2014-2019. Adapun 2 diantaranya berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan meliputi mengolah dan mempersiapkan seluruh data, membaca keseluruhan data, *coding* semua data, menetapkan proses *coding*, menghubungkan tema / deskripsi, dan terakhir Interpretasi makna tema / deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo dilihat dari kegiatan pemilihan dan kegiatan organisasi sangat baik. Sedangkan untuk partisipasi politik dilihat dari *lobbying* dan mencari koneksi, kader perempuan belum banyak berpartisipasi dalam hal tersebut karena faktor kurangnya kemampuan dan pengalaman. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik kader perempuan meliputi penerimaan rangsangan politik dan sistem politik dan partai politik setempat. Sedangkan karakteristik sosial dan kondisi lingkungan dan tempat tinggal bukanlah faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik kader perempuan.

Saran yang diberikan berdasar penelitian ini yaitu kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan *lobbying* dan mencari koneksi sehingga dapat memberikan peran dan pengaruh lebih dalam mencapai suatu tujuan politik.

ABSTRACT

Umah, Vina Rohmatul.2019. *Political Participation of Female Cadres of Nasional Demokrat (NasDem) Party in Wonosobo Regency.*Final Project.Politics and Citizenship Department, Faculty of Social Sciences.Universitas Negeri Semarang. Advisor I Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.130 p

Keywords: Political Participation, Female Cadres, and Nasional Demokrat (NasDem) Party

The 1998 Indonesian reformation had brought new changes to the Indonesian political system. One of them is the guarantee of women's human rights to be able to participate in the political sector. However, female political participation in Indonesia is still low. That is due to various factors such as patriarchal culture and stereotypes. Female political participation can be increased through institution called a political party. Based on data from the Wonosobo Regency legislative, there were only Three women out of a total of 42 members of the Wonosobo District Parliament in 2014-2019. The two of them came from the Wonosobo Regency Nasional Demokrat (NasDem) Party. Therefore, the objectives of this study includes: 1) What is the political participation of female cadres of the Wonosobo Nasional Demokrat (NasDem) Party, 2) What are the factors that influence the level of political participation of female cadres of the Wonosobo Nasional Demokrat (NasDem) Party.

This research uses a qualitative descriptive analysis approach. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. Test data validity using source triangulation. Data analysis techniques used include processing and preparing all data, reading the entire data, coding all data, establishing coding processes, linking themes / descriptions, and finally interpreting the meaning of themes / descriptions.

The results of the research showed that the political participation of female cadres of the Nasional Demokrat (NasDem) Party of Wonosobo Regency viewed from the election activities and organizational activities were very good. Whereas for political participation seen from lobbying and seeking connections, female cadres have not participated much in this matter due to a lack of ability and experience. The factors that influence the level of political participation of female cadres include the acceptance of political stimuli and political systems and local political parties. Whereas social characteristics and environmental and residential conditions are not factors that influence the political participation of female cadres.

Suggestions given based on this research are that the cadres of the Wonosobo Regency Nasional Demokrat (NasDem) Party are expected as able to improve their ability to lobby and find connections so that they can provide more roles and influence in achieving a political goal.

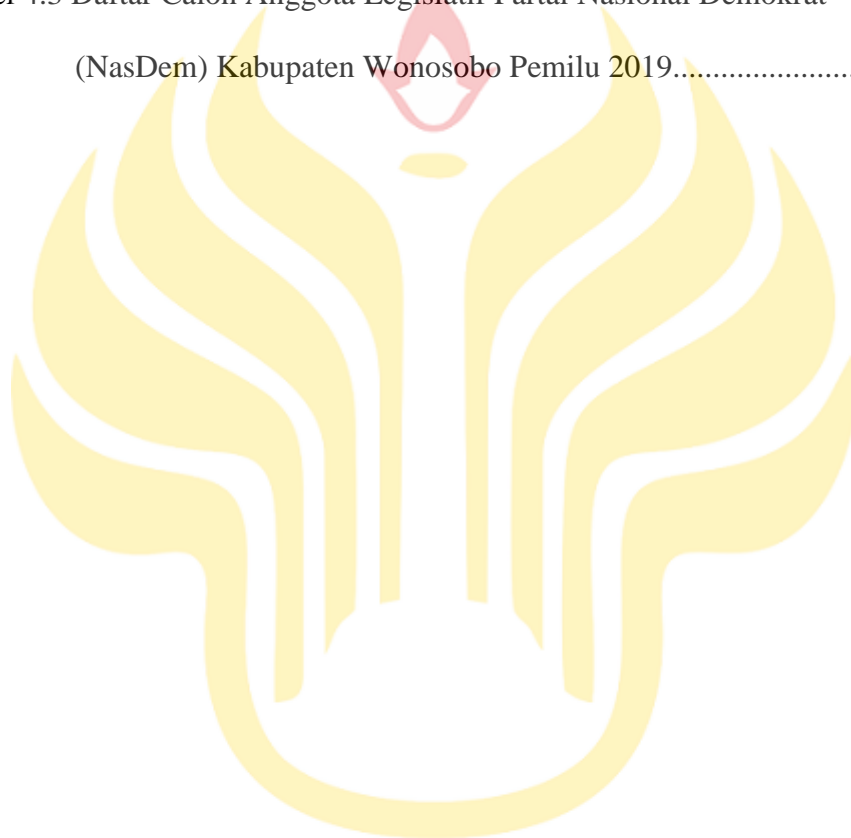
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Deskripsi Teoretis.....	13
1. Konsep Tentang Partisipasi Politik	13
2. Partisipasi Politik Perempuan.....	28
3. Konsep Tentang Gender.....	29
4. Ketimpangan Gender dalam Politik	30
5. Konsep Tentang Partai Politik.....	32
6. Partai Nasional Demokrat (NasDem).....	35
B. Kajian Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berpikir	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Latar Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	54
E. Uji Validitas Data	59
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Hasil Penelitian.....	65
1. Gambaran Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem).....	65
2. Gambaran Umum Objek Penelitian	68
3. Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Wonosobo	74
4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi tingkat Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Wonosobo	99
B. Pembahasan	110
1. Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.....	111
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.....	119
BAB V PENUTUP.....	125
A. Simpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2014-2019.....	7
Tabel 2.1 Bentuk Bentuk Partisipasi Politik Menurut Gabriel Almond	20
Tabel 4.3 Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo Pemilu 2019.....	82



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Piramida Partisipasi Politik Roth dan Wilson.....	20
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	48
Bagan 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	63



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lambang Partai Nasional Demokrat (NasDem).....	39
Gambar 4.2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Kader Perempuan Kepada Komunitas Ibu - Ibu PKK.....	79
Gambar 4.3 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pengurus DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo	92
Gambar 4.4 Dokumentasi Partisipasi Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo dalam Kegiatan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	132
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	133
Lampiran 3 Surat Tanda Telah Melakukan Penelitian.....	134
Lampiran 4 Instrumen Penelitian.....	135
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	146
Lampiran 6 Pedoman Observasi.....	152
Lampiran 7 Pedoman Dokumentasi.....	154
Lampiran 8 Transkrip Wawancara.....	155
Lampiran 9 Struktur Kepengurusan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.....	186
Lampiran 10 Struktur Kepengurusan Garnita Melahayati DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.....	187
Lampiran 11 Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasional Demokrat.....	188

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi bangsa Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa perubahan dalam sistem politik Indonesia. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen untuk ikut serta di dalamnya dengan tujuan mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang demokratis. Termasuk memberikan ruang yang cukup lebar bagi kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam bidang politik di Indonesia.

Undang – Undang RI no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak perempuan (*Convention on the Political Right of Woman*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Woman*) tersebut ditegaskan melalui Undang – Undang no. 7 tahun 1984. Perempuan perlu hadir dalam politik merujuk konsep *politics of presence* dari Anne Phillips. Menurutnya kehadiran perempuan dalam politik didasari oleh prinsip kesetaraan politik yang mengasumsikan setiap orang seharusnya menghitung satu, dan tidak satu pun boleh melebihi yang lain (Philips,1995:30).

Melalui kebijakan *affirmative action*, yaitu dalam Undang – Undang no 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang no 2 tahun 2008 tentang

Partai Politik menguatkan aturan mengenai keterwakilan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dibidang politik sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 bahwa “Pendirian dan pembentukan partai politik dengan menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Sejalan dengan hal tersebut, kesempatan bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen juga terbuka lebar dengan adanya Undang – Undang no 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum dan dipertegas pada pasal 53 bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.

Terbukanya ruang yang lebar bagi perempuan ini, harus diimbangi pula oleh adanya partisipasi politik kaum perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik bertalian dengan adanya kebijakan yang mendukungnya. Kebijakan itu berkenaan erat dengan bagaimana kemudian dampaknya terhadap representasi perempuan dalam politik (Hughes, 2011:604). Kebijakan minimal 30% keterlibatan perempuan dalam partai politik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dibidang politik serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terlibat dalam pengambilan suatu kebijakan atau keputusan baik di dalam partai politik maupun didalam lembaga pemerintahan.

Kendati kesempatan perempuan untuk terlibat dibidang politik cukup lebar, secara realitas Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah. Hasil Pusat Kajian

Politik Universitas Indonesia tahun 2014 mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20% (Haryanti dkk, 2018:76). Angka tersebut masih jauh dari harapan kuota 30%, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai salah satu langkah *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang politik.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah budaya patriarki yang berkembang di Indonesia. Budaya patriarki yang kuat dalam struktur sosial budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia, berhasil menempatkan perempuan di posisi kedua setelah laki – laki dan kedudukannya menjadi tidak sama melainkan membuat kedudukan perempuan menjadi ter subordinasi, meskipun secara konstitusional kedudukan antara laki – laki dan perempuan adalah sama seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut Mansour Fakih (2008:9), sejarah munculnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan – perbedaan tersebut kemudian dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan (tafsir keagamaan) dan negara. Melalui proses yang panjang, sosialisasi perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah – olah bersifat biologis, tidak bisa diubah, sehingga kemudian perbedaan – perbedaan

gender dipahami sebagai kodrat laki – laki dan perempuan. Lebih lanjut Mansour Fakih mengatakan bahwa Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki – laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Fakih, 2008:12).

Mansour Fakih (2008:12-13) mengungkapkan dampak yang dimaksud dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:

- (1)Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan;
- (2)Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik;
- (3)Pembentukan stereotype atau pelabelan negatif;
- (4)Kekerasan (*violence*), baik secara fisik maupun non fisik; dan
- (5)Beban kerja yang panjang dan lebih banyak (*burden*).

Persepsi bahwa perempuan adalah subordinasi dari laki – laki dan dianggap tidak penting dalam keikutsertaan pengambilan keputusan politik, menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya kuota perempuan di parlemen. Persepsi ini diperkuat dengan adanya persepsi di dalam benak masyarakat yaitu konsep – konsep stereotip tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk sektor politik dan pemerintahan. Astuti menyatakan bahwa persepsi yang kebanyakan merupakan pelabelan tentang perempuan, akhirnya ditarik ke dunia publik termasuk dunia politik bahwa perempuan tidak layak memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosional yang menghalangi partisipasi dan representasi politik perempuan (Hariyanti dkk, 2018: 77).

Menurut hasil penelitian tentang partisipasi politik perempuan di negara – negara berkembang, ada kecenderungan rendah dibandingkan laki – laki. Peralnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga atau domestik. Di sisi lain, Soeharto (2009:3) menyatakan adanya pesimisme dan sinisme masyarakat berkaitan dengan peran partai politik selama ini, yang tidak lepas dari pengalaman dan realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga rekrutmen kader partai politik belum terpola dengan baik dan berkelanjutan, menyebabkan kurang tersedianya kader perempuan partai dengan kualitas yang memadai guna mengisi struktur lembaga politik untuk mendukung peningkatan kualitas partai dan berpotensi dalam memenangkan partai dalam pemilu.

Partai politik adalah kunci bagi peningkatan partisipasi politik serta portal strategis penyiapan calon untuk jabatan publik (Harnoko, 2012:231). Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara. Dengan begitu partai politik merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan tersebut dapat diupayakan salah satunya melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik kader perempuan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh partai politik. Adapun muara dari pendidikan politik selain meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban politik bagi warga negara, juga tingginya partisipasi politik kader perempuan.

Pendidikan politik diberikan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan sebab dalam pendidikan politik oleh partai politik ditujukan tidak hanya untuk mempersiapkan kader menjadi politisi yang loyal terhadap partai politiknya melainkan untuk manfaat jangka panjang, yakni membentuk seorang negarawan yang arif dan bijak dalam bersikap dan berperilaku terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Pendidikan politik dalam rangka pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan pendapat Branson & Quigley (1998:45) bahwa;

Karakteristik warga negara melek politik adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang disebutkan dalam 3 komponen yaitu (1)*Civic Knowledge* yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan; (2)*Civic Disposition* yakni nilai, sikap, dan komitmen kewarganegaraan; (3)*Civic skill* yakni perangkat ketrampilan intelektual, sosial dan personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizen*) sebagaimana yang dicitakan oleh negara.

Pendapat yang dikemukakan Branson dan Quigley tersebut memandang bahwa pendidikan politik yang diberikan kepada kader partai politik tidak hanya menuntut kemampuan ataupun keterampilan dibidang politik maupun pemerintahan saja, melainkan agar kader memiliki rasa, sikap, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Sehingga partisipasi perempuan yang ada tidak hanya mengandalkan terpenuhinya kuantitas yang tersedia, melainkan juga kualitas dalam diri kader partai politik baik dari sisi wawasan atau pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan.

Rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa partai politik belum mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang ada, salah satunya adalah minimnya keterwakilan perempuan yang duduk di lembaga legislatif tingkat

daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Di provinsi Aceh misalnya, berdasarkan hasil pemilu 2014, ada anggota DPRD atau sekitar 13,6%. Hasil Komisi Pemilihan Umum Independen (KIP) Aceh belum memenuhi kota 30% keterwakilan perempuan di parlemen lokal (Mardiah, 2017:299).

Kabupaten Wonosobo juga termasuk salah satu daerah yang tingkat keterwakilan perempuan di parlemen rendah. Di mana keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen sangat rendah yaitu hanya terdapat 3 orang dari 42 anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang ada. Berikut adalah tabel komposisi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2019:

Tabel 1.1 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2014-2019

			Jumlah
	-	9	9
PKB	-	8	8
Partai Golkar	-	4	4
	-	4	4
PAN	1	2	3
PPP	-	4	4
	2	2	4
	-	4	4
	-	4	4
PKS	-	1	4
	Jumlah		42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi antara jumlah anggota legislatif perempuan dan laki – laki di dalam lembaga legislatif Kabupaten Wonosobo. Hal ini tentu saja masih jauh dari angka jumlah minimum keterwakilan perempuan yang ideal yaitu 30%. Aturan

tentang keterwakilan perempuan minimal 30% tidak akan berjalan dengan efektif apabila pemahaman dan ketrampilan perempuan masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke dunia politik, baik hanya sebagai kader biasa ataupun yang sudah duduk di lembaga baik eksekutif maupun legislatif dapat menunjukkan perannya dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan politik.

Partai politik berperan penting dalam mendorong partisipasi politik kader perempuan guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan internal partai maupun yang duduk sebagai pejabat publik di Kabupaten Wonosobo. Partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan partai baru yang mampu mendudukkan wakil perempuannya di lembaga legislatif Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 orang yang mana memiliki wakil perempuan terbanyak di DPRD Kabupaten Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo memiliki keseriusan dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik. Keberhasilan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam mendudukkan dua kader perempuannya di parlemen juga tidak lepas dari partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai **“Partisipasi Politik Kader Perempuan di Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Wonosobo”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi politik kader perempuan di Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik kader perempuan di Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik kader perempuan di Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kader perempuan di Partai Nasional (NasDem) Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan sekaligus dapat dijadikan sumber referensi bagi sivitas akademika dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menambah literasi mengenai hak asasi perempuan dalam bidang politik yang mana juga menjadi ranah kajian mahasiswa program studi

Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mahasiswa jurusan Politik Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan mencari dan mengolah informasi sehingga menjadi sumber data yang bermanfaat bagi khalayak umum. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah yang bermutu.

b. Bagi Institusi Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Semarang)

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi terkait upaya mengembangkan Rumah Ilmu bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu Universitas Negeri Semarang dalam upaya meningkatkan kualitas di bidang riset dan teknologi.

E. Batasan Istilah

Berikut ini merupakan batas istilah terkait dengan objek penelitian yang akan dikaji:

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan

jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarjo, 2008:367).

Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi politik yang dilakukan oleh kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo dilihat dari keterlibatannya dalam kegiatan pemilihan, pelobian (*lobbying*), kegiatan organisasi, dan kegiatan mencari koneksi (*contacting*).

2. Kader Perempuan

Kader perempuan adalah orang – orang perempuan yang berkecimpung ke dalam kegiatan partai politik. Mereka adalah sekelompok warga negara yang dididik pada suatu pendidikan kader dalam organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi partai politik untuk dapat mencapai tujuan partai politik tersebut (Ferdiana, dkk, 2013:18).

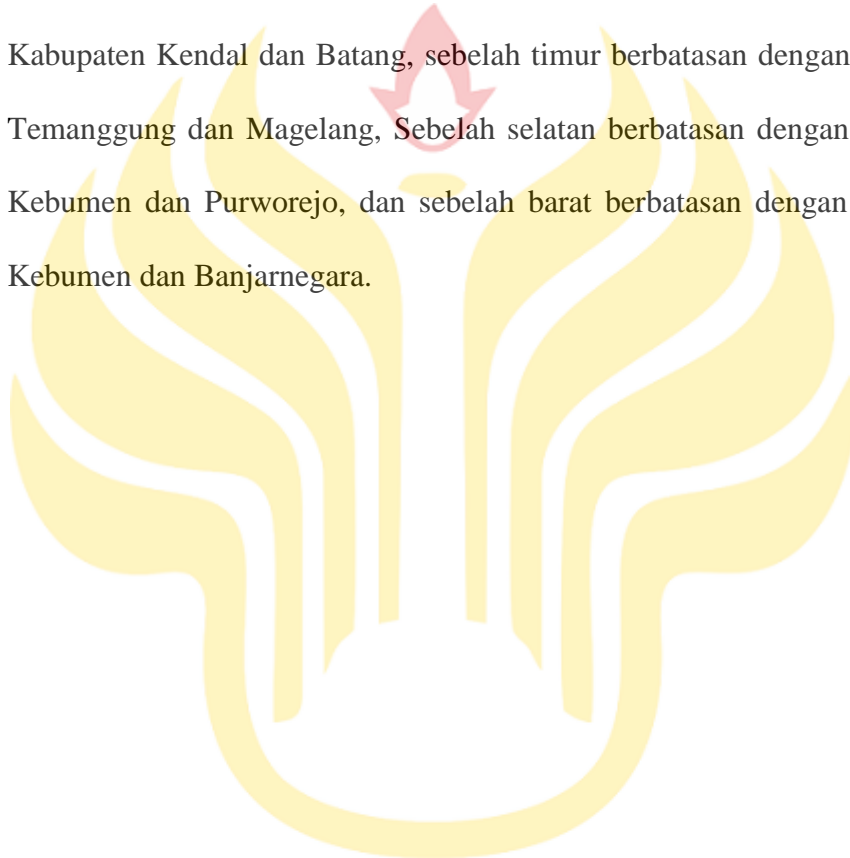
Penelitian ini membatasi pengertian kader perempuan yang menjadi pengurus DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo dan kader perempuan yang menjadi pengurus Garnita (Gerakan Wanita) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.

3. Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Partai ini baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat (NasDem).

4. Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Wonosobo terletak di bagian tengah – tengah dan berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Konsep Tentang Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Sahid, 2011:176).

Sastroatmodjo (1995:67) mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Setiadi dan Kolip (2013:128-129) juga menyatakan bahwa partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Jadi kegiatan – kegiatan partisipasi politik merupakan kegiatan yang sukarela dalam

pengambilan bagian oleh masyarakat untuk ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:4) mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara preman dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat dilakukan secara spontan, sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak. Di negara – negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan – tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang – orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi Partisipasi politik merupakan pengejawentahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Imawan (2003:4-5) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi. Artinya tidak ada partisipasi berarti tidak ada demokrasi. Tanpa adanya partisipasi mustahil produk - produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga negaranya. Terdapat tiga macam aspek dalam partisipasi, yang *pertama* yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, *kedua* yaitu adanya kesempatan untuk memperjuangkan pandangan kepentingannya tersebut baik secara individu maupun bersama – sama, dan *ketiga*, yaitu adanya perlakuan yang sama terutama dari

pemerintah yang berkuasa, terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh warga negaranya.

Prihatmako (2008:46) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dikatakan bahwa partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Menurut Maran (2001:147), partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin – pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

Michael Rush Philip Althoff (2000:124) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam – macam tingkatan di dalam sistem politik. Sedangkan Kevin R Hardwic mengungkapkan partisipasi politik memberi cara – cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan – kepentingan mereka terhadap pejabat – pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan – kepentingan tersebut (Gatara dan Said, 2007:91).

Ramlan Surbakti (2010:180) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi, partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa

(yang tidak mempunyai wewenang) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

Kemudian, kegiatan – kegiatan yang menjadi “rambu – rambu” partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (2010:180-181) yaitu:

Pertama, partisipasi yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. *Kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. *Ketiga*, baik kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Gaventa dan Valderama menyatakan bahwa partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik dengan negara. Oleh karena itu, partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung. Lanjutnya, partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganisasi untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk memengaruhi wakil – wakil pemerintah Sahid, 2011:176-

177). Dengan demikian, Gaventa dan Valderama lebih melihat partisipasi politik sebagai orientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil – wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan” ketimbang “partisipasi aktif” dan langsung dalam proses – proses pemerintahan itu sendiri.

Budiarjo (2008:367) mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

b. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994:16-18) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam empat bentuk sebagai berikut:

1) Kegiatan pemilihan

Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk – bentuk partisipasi politik lainnya, dan oleh sebab itu faktor – faktor yang berkaitan dengan itu seringkali membedakannya dari jenis – jenis partisipasi politik lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan – kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan

suaa dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk – bentuk utama lainnya dari tindakan politik (Huntington dan Nelson, 2004:16-17)

Ramlan Surbakti (2010:12) menyatakan bahwa memilih ialah suatu aktivitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok sesuai dengan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif.

Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku memilih ialah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

2) Kegiatan Melobi (*Lobbying*)

Kegiatan melobi (*Lobbying*) yang mencakup upaya – upaya, baik perorangan maupun kelompok untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah atau pimpinan – pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan – persoalan yang menyangkut sejumlah orang besar. Menurut AB Susanto menyatakan melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak – pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik pelobi, dengan demikian diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan (Panuju, 2010:18)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melobi adalah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang.

Istilah “pelobian” merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang.

3) Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha – usahanya kepada kepentingan – kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan – persoalan umum yang beraneka ragam (Huntington dan Nelson, 2014:17)

4) Mencari Koneksi (*contacting*)

Mencari koneksi (*contacting*) yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya

dengan maksud memperoleh manfaat baik hanya seorang atau beberapa orang (Huntington dan Nelson, 2004:17)

Almond (1993:46-47) mengemukakan bahwa partisipasi politik terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Bentuk Bentuk Partisipasi Politik Menurut Gabriel Almond

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suara (voting) • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Berdemonstrasi • Konfrontasi, mogok • Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman) • Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan).

Sumber : Almond (1993:46-47)

Berikut merupakan piramida partisipasi politik yang dikemukakan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori yaitu terdiri atas (1) Aktivis (*activists*); (2) Partisipan (*participants*); (3) Penonton (*onlookers*); dan (4) Apolitik (*apoliticals*).



Bagan 2.1 Piramida Partisipasi Politik Roth dan Wilson
Sumber : Roth dan Wilson (dalam Budiarto, 2008:373)

Pada bagan 2.1 kelompok paling bawah adalah kelompok orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik yang oleh Roth dan Wilson disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas kelompok apolitis adalah kelompok pengamat. Kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum partai politik, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Bentuk partisipasi yang lain ialah mengikuti suatu rapat umum demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, atau oleh kelompok – kelompok kepentingan tertentu. Partisipasi semacam ini bisa bersifat spontan, tetapi seringkali karena diorganisir oleh partai – partai politik atau kelompok – kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing – masing. Dalam kasus seperti ini, orang pada dasarnya berpartisipasi bukan berdasarkan kesadaran sendiri, melainkan karena dimobilisasi. Namun kegiatan – kegiatan semacam itu berlangsung hanya sebentar (Maran, 2001:150-151).

Termasuk bentuk partisipasi politik yang sebentar – sebentar adalah diskusi politik informal, yang dilakukan entah di dalam keluarga, entah di tempat kerja, atau di tempat lain. Memang terdapat orang – orang yang berminat untuk membahas fenomena – fenomena politik yang aktual, dalam pertemuan – pertemuan yang informal sifatnya. Bentuk partisipasi politik yang tidak menuntut banyak upaya ialah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara. Kegiatan ini yang diperlukan hanya sedikit inisiatif (Maran, 2001:151).

c. Tipologi dan Model Partisipasi Politik

Partisipasi politik dilihat sebagai suatu kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Di pihak lain partisipasi pasif antara lain seperti kegiatan menaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995:74). Dalam proses, orang bisa beralih dari partisipan aktif ke partisipan pasif, begitu pun sebaliknya. Hal ini tidak jadi masalah, karena yang terpenting adalah komitmen mereka untuk membangun organisasi politik mereka secara bertanggung jawab. Dengan demikian eksistensi organisasi politik yang

bersangkutan mempunyai arti baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi para anggotanya (Maran, 2001:150).

Tipologi partisipasi politik dapat juga dikategorikan berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu (Sastroatmodjo,1995:77).

Maribah dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- 1) Apatis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari aktivitas politik.
- 2) Spektator adalah orang yang setidak – tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- 3) Gladiator adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- 4) Pengeritik adalah orang – orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional (Maran, 2011:181)

Sedangkan Peige membagi partisipasi politik menjadi empat tipe antara lain:

- 1) Aktif yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi.

- 2) Apatis yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah dan apabila partisipasi politik cenderung pasif tertekan.
- 3) Militan Radikal yaitu apabila kesadaran politik tinggi terdapat kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.
- 4) Pasif yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi (Surbakti, 2010:184)

d. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Milbrath (dalam Sahid, 2011:187-188). memberikan empat faktor atau alasan partisipasi politik antara lain:

- 1) Berkenaan dengan penerimaan rangsangan politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak – kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Selain itu juga kepedulian terhadap isu – isu sosial, politik, budaya, dan ekonomi.
- 2) Karakteristik sosial seseorang. Status sosial ekonomi, karakteristik suku, jenis kelamin, usia, keyakinan agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam politik
- 3) Sifat dan sistem politik dan partai tempat seseorang itu berada. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai – partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan

memperjuangkan kepentingan massa, sehingga cenderung berpartisipasi dalam politik

- 4) Keadaan geografis dan lingkungan. Keadaan geografis dan lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan watak dan tingkah laku individu. Perbedaan – perbedaan geografis dan lingkungan akan menyebabkan perbedaan – perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Arnstein (1969:219) berpendapat bahwa partisipasi politik masyarakat didasarkan pada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Lebih rinci, ia menjelaskan faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Sedangkan menurut Frank Lindenfeld (dalam Sahid, 2011:98), faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Menurutnya, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Menurut Surbakti (2010:185) menyebutkan:

Ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama*, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak – hak politik, hak

ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat jaminan sosial dan kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. *Kedua*, menyangkut bagaimanakah penilaian seseorang dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Arbi Sanit menyebut lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia diantaranya *Pertama*, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik. *Kedua*, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. *Ketiga*, adanya keleluasaan untuk mengorganisasikan diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. *Keempat*, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupaya kekayaan dalam masyarakat. *kelima*, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan (Sahid, 2011:187).

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (1998:187) faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah budaya kewargaan (*civic culture*). Bahkan, faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya partisipasi politik warga.

Meluasnya partisipasi politik menurut Weimer (1998:89-90) dipengaruhi oleh lima hal. Pertama ialah modernisasi; Kedua, terjadinya perubahan – perubahan struktur kelas sosial; Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa; Keempat, adanya konflik antara pemimpin – pemimpin politik; dan kelima yaitu adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

e. Fungsi Partisipasi Politik

Robert Lane menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu – individu diantaranya: (1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis; (2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial; (3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai – nilai khusus; (4) Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu (Sahid, 2011:184).

Di sisi lain, Arbi Sanit memandang ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu: (1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya; (2) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekuarangan pemerintah; dan (3) Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokkan, huru hara, dan kudeta (Sahid, 2011:184).

Partisipasi politik juga memiliki fungsi bagi kepentingan pemerintah diantaranya: (1) Mendorong program – program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah; (2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan; (3) Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam

perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan (Sahid, 2011:184).

2. Partisipasi Politik Perempuan

Pada awal kemunculannya, demokrasi berasal dari warisan tradisi Yunani yang menempatkan perempuan sebagai budak belian dan tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum (Almond dan Verba dalam Lero, 2017:24). Kenyataan sejarah ini sangat bertentangan dengan pengertian demokrasi itu sendiri yang semestinya menghadirkan keadilan bagi semua kalangan. Artinya bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan kaum laki – laki tetapi juga di tangan kaum perempuan (Lero, 2017:24)

Data menunjukkan bahwa negara – negara yang menjunjung tinggi dan mendukung emansipasi dan partisipasi politik perempuan baik di lembaga – lembaga kekuasaan negara maupun peranan – peranan politik resminya, tetap didominasi oleh kaum laki – laki. Hal ini dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan negara, ras, kelas, latar belakang etnis dan agama. Alasan utamanya adalah mengenai persoalan memahami istilah kekuasaan (*power*). Kaum perempuan memiliki kekuasaan politik tetapi sedikit kekuatan, legitimasi dan otoritasnya.

Di Indonesia, isu gender yang dikonstruksi salah berimbas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk bidang politik. Hal ini dapat dilihat pada hasil keterwakilan perempuan di parlemen (DPR). Sebagai contoh, perempuan hanya terwakili 9,7% di DPR hasil Pemilu 1997, kemudian menurun menjadi 8,4% dari hasil Pemilu 1999, lalu naik menjadi

11,5% dari hasil Pemilu 2004. Padahal partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilih lebih tinggi daripada laki-laki. Pemilu 1999 diikuti 57% pemilih perempuan dan Pemilu 2004 diikuti 53% pemilih perempuan (Lero, 2017:25).

3. Konsep Tentang Gender

Gender adalah sebuah kata kuno yang diberi makna baru. Dalam perkembangannya, gender menjadi sebuah ideologi. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. Istilah gender sering kali dirancukan dengan seks. Seks mengacu pada perbedaan biologis, seperti kromosomal, hormon, atau fisik antara laki – laki dan perempuan. Sedangkan gender mengacu pada identitas sosial yang mengandung peranan yang harus dilakukan oleh seseorang karena jenis kelamin mereka, di mana peranan tersebut sesuai dengan konstruksi sosial maupun kultural (Fakih, 2008:8).

Orang yang pertama kali memakai istilah gender dalam makna yang berbeda adalah Ann Oakley. Ann Oakley (2005:98) mengemukakan bahwa gender adalah perbedaan sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin, dalam mana perbedaan sosial itu dibakukan dalam tradisi dan sistem budaya masyarakat.

Pembakuan perbedaan sosial itu amat ditekankan oleh Wilson dan Lindsey (1990:78) bahwa Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki – laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi berbeda yaitu laki – laki dan perempuan. Sementara itu Lindsey mengatakan

bahwa yang termasuk kajian gender adalah semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki – laki atau perempuan. Budaya terhadap laki – laki dan perempuan. Jadi gender merupakan harapan – harapan budaya terhadap laki – laki atau perempuan. Budaya yang biasanya dikaitkan dengan pembahasan gender dan yang mengakibatkan ketidakadilan gender adalah dominasi patriarkhat, yaitu suatu sistem dari praktik – praktik sosial dan politik di mana kaum laki – laki menguasai menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Perbedaan laki – laki dan perempuan yang dihasilkan dominasi patriarkhat tersebut, yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa laki – laki berstatus dan mempunyai hak yang lebih dari perempuan, dan mempunyai hak yang lebih dari perempuan, dan bahwa peran perempuan terbatas hanya pada area tertentu, dan ujung – ujungnya adalah diskriminasi terhadap perempuan dalam status dan peranan.

Dapat disimpulkan pengertian gender adalah perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial, yaitu perbedaan yang bukan karena kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan, baik oleh kaum laki-laki maupun oleh kaum perempuan sendiri. Melalui proses sosial budaya yang panjang.

4. Ketimpangan Gender dalam Politik

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang

menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki – laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Dampak yang dimaksud dapat dilihat dalam beberapa manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut: (1)Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan; (2)Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3)Pembentukan stereotype atau pelabelan negatif; (4)Kekerasan (*violence*), baik secara fisik maupun non fisik; dan (5)Beban kerja yang panjang dan lebih banyak (*burden*) (Fakih 2008:12-13).

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran – pikiran cerdas, kesemuanya itu diasumsikan milik laki – laki bukan milik perempuan. perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, kesemuanya itu sudah menjadi stereotip perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki – laki dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki – laki dan dunia domestik milik perempuan.

Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender. Faktor lain adalah, ketimpangan – ketimpangan gender dalam sosial budaya

mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih sedikit dibandingkan laki – laki. Akibatnya, karena perempuan tak mempunyai pengetahuan yang memadai, maka ia tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah mengingat dunia politik adalah milik laki – laki, sehingga masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik kepada kaum perempuan (Handoyo dkk,2015:172-173).

5. Konsep Tentang Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kedudukan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiarjo, 2008:403-404).

Menurut Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiel (Budiardjo, 2008:404).

Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis – aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui

persaingan dengan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan – kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga – lembaga pemerintahan yang resmi (Budiardjo, 2008:404)

Menurut Chhibber dan Ken Kollman bahwa partai politik adalah sekelompok kandidat yang berusaha masuk dalam pemilihan umum di bawah label yang sama. Partai politik dan sistem partai, menurut Chhibber dan Ken Kollman merupakan sesuatu yang vital bagi politik demokrasi modern. Sedangkan Janda memahami partai politik yaitu organisasi yang mensponsori para kandidat untuk masuk dalam jabatan politik (Handoyo dkk, 2016:136).

Handoyo, dkk (2016:137) menjelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang memberikan jalan bagi anggota atau kadernya untuk berkompetisi memperoleh suara rakyat guna mengisi jabatan – jabatan politik melalui pemilihan umum. Pihak yang dipinang oleh partai untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik, maupun jabatan administratif, dapat berasal dari kalangan partai maupun dari luar partai yang berkomitmen terhadap partai atau setidaknya yang dapat menguntungkan masa depan partai.

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki setidaknya 4 fungsi menurut Janda yaitu :

(1) Menominasikan kandidat melalui pemilihan untuk masuk dalam

jabatan publik; (2) Melalui strukturisasi pilihan suara dalam pemilihan umum; (3) Mengajukan alternatif program pemerintah; dan (4) Mengkoordinasikan tindakan – tindakan pejabat – pejabat pemerintah (Handoyo, 2016:140-141)

Amal memberikan penjelasan mengenai fungsi partai politik diantaranya (1) Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik; (2) Fungsi partai politik sebagai agregasi dan artikulasi kepentingan; (3) Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik; (4) Fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik; (5) Fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik; (6) Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik (Handoyo, 2016:141).

Ketentuan Undang - Undang RI no 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 11 dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai: (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) Pernyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Imawan (2003:26) mengemukakan bahwa pada prinsipnya partai politik memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan merumuskan aspirasi rakyat untuk dikelola oleh sistem politik; (2) Menempatkan wakil – wakil yang dipandang cakap untuk mewujudkan aspirasi rakyat.

6. Partai Nasional Demokrat (NasDem)

a. Sejarah Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Kongres I Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang digelar pada 25 s.d. 26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini satu diantaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat periode 2013 s.d. 2018. Ibarat perahu, layar telah terkembang, lengkap dengan nahkoda dan awak kapal.

Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan pimpinan wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem) bersatu suara mempercayakan Surya Paloh menjadi nahkoda Partai Nasional Demokrat (NasDem) secara lima tahun. Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus selesai selambat – lambatanya 14 hari sejak Surya Paloh

terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Tidak hanya itu, kongres juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Mengapa kongres memberikan mandat penting kepada Surya Paloh? Pasalnya, pemilu 2014 sudah di depan mata. Oleh sebab itu kongres memandang rekrutmen calon legislatif (caleg) merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya memenangi Pemilu 2014. Kongres I Partai Nasional Demokrat (NasDem) saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.

Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi ketua umum, Surya Paloh menjelaskan bahwa jabatan ketua umum bukanlah kredit poin. Pasalnya, Surya Paloh merupakan pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan sempat menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sejak partai ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum Surya Paloh terpilih secara resmi menjadi ketua umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah Patrice Rio Capella yang dipercaya sebagai ketua umum. Kongres I Partai Nasional Demokrat (NasDem) 25-26 Januari 2013 disebut Surya Paloh sebagai tonggak sejarah partai ini

dalam melakukan gerak dan langkah ke depan untuk melakukan perubahan melalui gerakan Restorasi Indonesia.

Partai ini, demikian Surya Paloh harus mampu memberi catatan dengan tinta emas dalam lembaran perjalanan partai – partai politik di Indonesia. Meskipun baru, Partai Nasional Demokrat telah membuat prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksud ialah partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkret (Restorasi Indonesia), sementara itu orang – orang yang ada didalamnya memiliki kemampuan yang luar biasa, baik prestasi, maupun militansinya dalam melakukan gerakan perubahan. Surya Paloh kemudian menunjuk Rio Capella yang berhasil memimpin partai hingga menggelar kongres partai yang pertama pada 25 s.d. 26 Januari 2013. Kemudian Rio Capella menyerahkan kepemimpinan partai periode berikutnya kepada Surya Paloh.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Deklarasi Partai Nasional Demokrat (NasDem) hanyalah salah satu tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini. Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai Nasional Demokrat (NasDem) didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai Nasional Demokrat tidak bisa dipisahkan dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

b. Visi dan Misi Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Visi yang digagas oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah: “Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam Budaya”

Untuk mewujudkan visi yang digagas tersebut, misi yang dirancang adalah sebagai berikut:

1. Membangun politik demokratis berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum, Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD NRI 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan demokrasi ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita – cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

3. Mendorong budaya gotong royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan negara dalam kehidupan global.

c. Makna Lambang Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Berikut ini adalah lambang dari Partai Nasional Demokrat (NasDem):



Gambar 2.1 Lambang Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Makna lambang adalah sebagai berikut:

1. Lingkaran biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan – gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian,, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang.

2. Dua siluet berwarna orange bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi kesejahteraan, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna orange melambangkan kemakmuran, seperti padi yang siap panen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan adalah kumpulan dari penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti. Pada dasarnya penelitian terdahulu bertumpu pada fenomena – fenomena yang dijadikan sebagai landasan. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Susi Susanti dan Adelita Lubis dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan” yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera cukup tinggi dilihat dari jumlah kader perempuan dan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai. Penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan Periode 2009-2014 karena pemenuhan kuota 30% caleg yang belum benar – benar serius diterapkan oleh partai – partai yang ada di Indonesia. Penelitian ini cukup relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterwakilan perempuan di

DPRD Kabupaten karena hanya 3 wakil perempuan dari total 42 anggota DPRD dan 2 perempuan berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Kendati didasari oleh latar belakang yang berbeda, tetapi penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai partisipasi kader perempuan dan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik kader perempuan. Perbedaan yang terdapat penelitian ini hanya terletak pada objek penelitiannya saja.

2. Dini Fitiriani dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Pangandaran)” yang dilakukan pada Tahun 2015. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa keterlibatan partisipasi politik perempuan di DPC PDIP Kabupaten Pangandaran masih rendah. Ini disebabkan oleh sudut pandang perempuan itu sendiri dan juga kultur masyarakat mengenai partisipasi politik perempuan khususnya di partai politik. Maka untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, kegiatan yang dilakukan DPC PDIP Kabupaten Pangandaran berupa pelatihan kepemimpinan dan diskusi interaktif yang dilakukan secara berkala. Penelitian ini berangkat dari pemikiran partisipasi politik perempuan bentuk Siyasah Syari’ah, yaitu prinsip persamaan, kebebasan, musyawarah ini yang menjadi landasan dalam siyasah Dusturiyah. Dalam islam perempuan tidak dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam politik, selama perempuan tidak menghilangkan kodrat dan kewajibannya sebagai perempuan. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dilatarbelakangi oleh permasalahan yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda pula di mana fokus penelitian pada penelitian Dini yaitu mengenai upaya partai politik dalam meningkatkan partisipasi kader perempuan, bentuk – bentuk partisipasi politik, dan tinjauan siyash dusturiyah tentang partisipasi politik.

3. Sri Sumarni Sjahril dengan judul “Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar)” yang dilakukan pada Tahun 2016. Hasil dari penelitian skripsi menggambarkan perempuan NasDem Kota Makassar memiliki peran sangat penting di masyarakat dalam hal memberikan pendidikan politik terhadap anak muda makassar, selain itu hadirnya perempuan di legislatif bukan hanya ajang untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marjinal. Hal itu dibuktikan dengan dirancangnya sebuah peraturan daerah mengenai air susu eksklusif dan salah satu pengusungnya ialah kader perempuan Partai Nasional Demokrat Kota Makassar. Implikasinya dari peran partai politik perempuan partai Nasional Demokrat Kota Makassar bagi penguatan posisi politik perempuan di mana Partai Nasional Demokrat Kota Makassar perempuan diberikan hak yang sama dengan laki – laki dalam berpolitik itu dibuktikan di Partai Nasional Demokrat Kota Makassar sendiri dipimpin oleh seorang perempuan yang juga terpilih menjadi wakil ketua DPRD Sulawesi

Selatan. Selain itu Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kota Makassar seorang kader perempuan yang juga merupakan wakil ketua DPRD Kota Makassar. itu membuktikan bahwa Partai Nasdem Kota Makassar memberikan perempuan posisi-posisi strategis dalam politik bukan hanya di legislatif saja tetapi dalam kepengurusan partai pun perempuan diberikan posisi yang strategis. Penelitian memiliki latar belakang yang sama yaitu berawal adanya jaminan persamaan kedudukan laki – laki dan perempuan di bidang hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana pada penelitian Sri Sumarni, fokus penelitiannya adalah peran partisipasi politik perempuan terhadap masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang hanya akan meneliti mengenai partisipasi politik perempuan beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

4. Samsinar Z Moga dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Palu “ yang dilakukan pada Tahun 2017. Hasil penelitian Moga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik di Kota Palu belum berjalan dengan baik karena berdasarkan 5 dimensi yang diamati di lapangan yaitu memilih kegiatan, melobi, kegiatan organisasi, pencarian koneksi, dan aksi kekerasan tidak dilakukan dengan baik karena posisi penawaran wanita masih rendah dan selalu menjadi nomor dua. Selain itu, partai politik di Kota Palu tidak memberikan ruang maksimal bagi perempuan, meski kapasitas maksimal secara intelektual dan profesional dalam melobi dan melakukan kegiatan partai lainnya.

Perbedaan antara penelitian Moga dengan penulis yaitu terletak pada obyek penelitian, di mana obyek penelitian Moga adalah seluruh partai politik yang ada di Kota Palu, sedangkan penulis hanya satu partai politik yang menjadi objek penelitian yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.

5. Dewi Walahe dengan judul “Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo” yang dilakukan pada 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam tata kelola Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Gorontalo belum mampu memenuhi keterwakilan perempuan 30% dalam pengelolaan partai politik sesuai dengan undang - undang no 20 tahun 2008 tentang Partai Politik. Ada empat faktor yang menghambat pemenuhan 30% representasi perempuan sampai tidak terpenuhi yaitu: *Pertama*, dari titik normatif, undang - undang yang mengaturnya adalah undang - undang no 2 tahun 2008 Jo. undang - undang no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik tidak efektif dalam proses implementasi. *Kedua*, faktor budaya, budaya patriarki, di mana laki – laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan; *ketiga*, Faktor partai politik itu sendiri. Partai kadang-kadang tidak pernah memberi perempuan kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai sehingga perempuan kadang-kadang diabaikan; dan *keempat*, faktor pribadi wanita itu. Wanita Indonesia masih banyak pesimis atau merasa takut pada dirinya sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilaksanakan penulis yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada kekuatan politik perempuan dalam organisasi partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta faktor – faktor yang menghambat pemenuhan kuota 30% representasi perempuan di DPRD. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih fokus pada partisipasi politik perempuan sebagai kader dari partai politik.

6. Ery Haryanti dkk dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara” yang dilakukan pada Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara cukup baik, meski ada hambatan – hambatan tertentu. Hambatan terbesar berasal dari dalam diri kader perempuan. Mereka tidak antusias menjalani persaingan dengan kader laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang ketat menyita banyak waktu mereka. Kader perempuan sendiri mengaku merasa kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas yang berkaitan dengan kebergabungannya dengan partai politik. Pada akhirnya kader perempuan memilih memprioritaskan tugas dalam rumah tangga daripada tugas yang lain. Dampaknya, kader perempuan menjadi lebih nyaman dengan posisinya sebagai pendukung yang baik bagi PKS dan bukan sebagai pesaing bagi kader laki-laki dalam memperoleh jabatan tertentu. Sebagian besar urusan yang tidak berkaitan dengan keperempuanan mereka serahkan kepada kader laki-laki. Penelitian

ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu mengenai partisipasi politik perempuan dalam suatu partai politik.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan ketimpangan sosial antara laki – laki dan perempuan di bidang politik. Diketahui bahwa persoalan budaya patriarki yang berkembang di Indonesia dan munculnya stereotip bagi perempuan memunculkan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap perempuan. Salah satunya adalah persepsi bahwa keikutsertaan perempuan dalam bidang politik tidaklah penting.

Reformasi 1998 telah membawa perubahan baru yaitu perlunya perempuan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam bidang politik sebagai bentuk representasi kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Untuk mengakomodasi keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam dunia politik, pemerintah telah membuka ruang melalui kebijakan *affirmative action* yang mana dalam kebijakan tersebut mengatur bahwa setiap partai politik dan lembaga legislatif baik tingkat pusat maupun tingkat daerah diharuskan melibatkan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Kendati demikian, secara realitas jumlah minimal 30% perempuan untuk terlibat dalam bidang politik belumlah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif baik ditingkat nasional maupun tingkat regional. Partai politik merupakan portal yang tepat dalam meningkatkan partisipasi politik bagi perempuan guna memenuhi kuota 30% sesuai undang - undang yang ditetapkan. Partisipasi perempuan dalam bidang

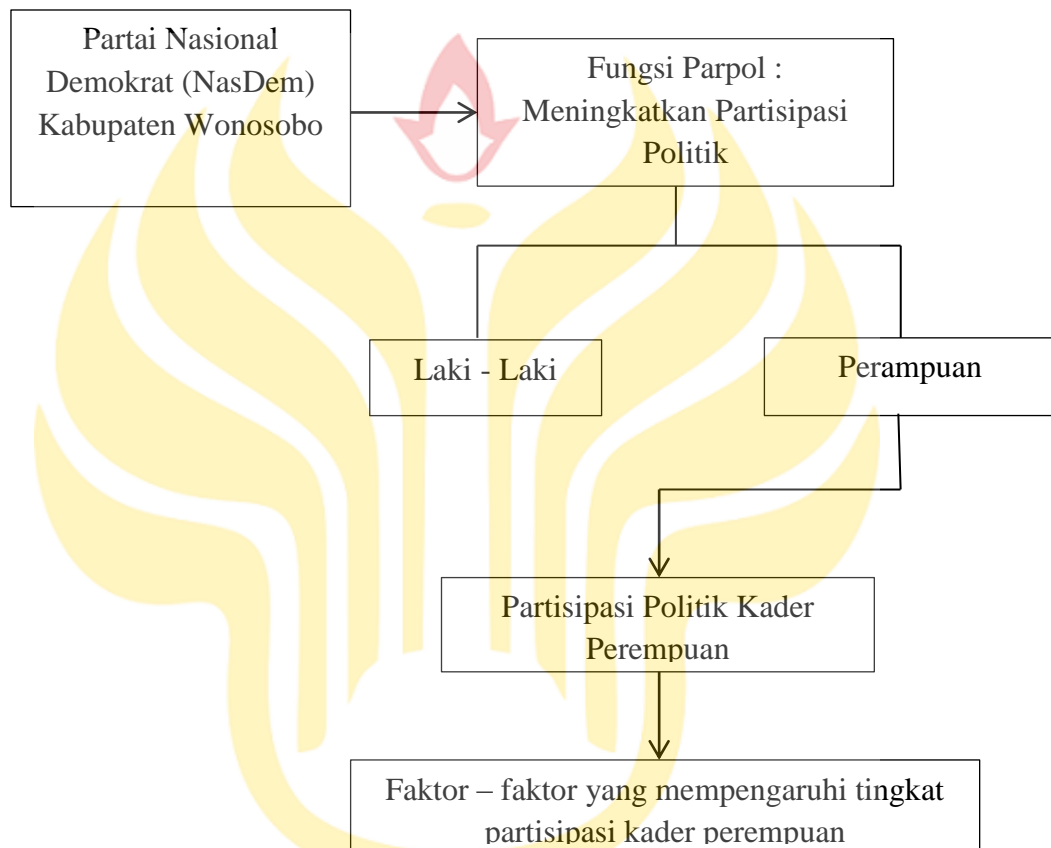
politik diharapkan tidak hanya diwujudkan karena faktor untuk memenuhi persyaratan saja, melainkan juga melihat dari sisi kualitas kader perempuan yang berkecimpung dalam bidang politik tersebut. Hal ini menjadi catatan bagi partai politik mengingat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat merupakan bagian dari fungsi adanya partai politik itu sendiri.

Salah satu daerah yang tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif adalah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, dari seluruh jumlah anggota yaitu 42 orang, hanya terdapat 3 orang perempuan yang menduduki kursi parlemen di Kabupaten Wonosobo. Hal ini tentu belum mampu memenuhi kuota 30% yang diharapkan.

Adapun ketiga perempuan tersebut, satu perempuan berasal dari Partai Amanat Nasional dan dua perempuan berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Melihat Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai satu – satunya partai yang mampu mendudukkan dua kader perempuannya di lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan salah satu partai yang memiliki keseriusan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender.

Berawal dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Wonosobo.

Kerangka berpikir penelitian mengenai partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Kabupaten Wonosobo disajikan dalam bagan 2.2 berikut ini:



Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo sangat baik dilihat dari kegiatan pemilihan dan kegiatan kegiatan organisasi. Hal ini buktikan dengan aktifnya kader perempuan dalam kegiatan sosialisasi anti golput, kampanye, mencari dukungan dalam pemilu, keterlibatannya menjadi peserta pemilu, perannya sesuai dengan jabatannya di DPD maupun di Garnita, Aktif mengikuti rapat dan turut mengambil peran dalam rapat baik di DPD maupun di Garnita, dan partisipasi kader perempuan dalam segala kegiatan yang diselenggarakan baik oleh partai, Garnita, lembaga sosial, maupun Pemerintah Daerah. Partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo masih kurang baik dilihat dari pelobian (*lobbying*) dan mencari koneksi (*contacting*). Hal tersebut dikarenakan kegiatan *lobbying* dan mencari koneksi (*contacting*) adalah kegiatan yang membutuhkan pengalaman dan *skill* yang cukup. Sedangkan di sisi lain setiap kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo memiliki pengalaman dan *skill* yang berbeda – beda.

2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo adalah faktor penerimaan rangsangan politik. Hal ini dilihat dari ketiga aspek yang meliputi kontak – kontak pribadi, organisasi, dan media massa yang memunculkan kesadaran dalam diri kader perempuan untuk terjun dan berpartisipasi politik. Di sisi lain sistem politik dan sistem partai di Indonesia turut menjadi faktor pendukung bagi partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo. Karakteristik sosial dan Kondisi geografis tempat tinggal tidak menjadi faktor yang berpengaruh bagi partisipasi politik kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo

Saran yang dapat diberikan adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu meningkatkan kemampuan *lobbying* dan *contacting* kader perempuannya melalui kegiatan – kegiatan seperti kaderisasi, pendidikan politik, maupun seminar – seminar.

2. Untuk Kader Perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo

Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan kader perempuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Wonosobo mampu meningkatkan

kemampuannya dalam *lobbying* dan *contacting* mengingat kemampuan tersebut penting bagi kader suatu partai politik. Sehingga kader perempuan dapat menunjukkan perannya dalam *lobbying* dan *contacting* sebagai upaya mencapai tujuan partai politik.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan dalam penelitian selanjutnya mengenai partisipasi politik perempuan, dapat dilaksanakan lebih mendetail dan spesifik lagi. Sehingga kedalaman dan keabsahan penelitian lebih teruji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel.1993.*Comparative Politics today*.New York:Longman.inc
- Almond, Gabriel dan Verba.1998.*The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*.Los Angeles:Sage Publication.
- Basrowi dan Suwandi.2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Branson, M.S.& Quigley, C.N.1998.*The Role of Civic Education*.Washington DC.
- Budiarjo, Miriam.2008.*Dasar – Dasar Ilmu Politik*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, John. W.2017.*Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*.Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Fakih, Mansour.2008.*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gatara, Said dan Dzulkiah Said.2007.*Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*.Bandung:CV Pustaka Setia
- Handoyo, Eko dan Puji Lestari.2017.*Pendidikan Politik*.Yogyakarta:Penerbit Pohon Cahaya
- Handoyo,Eko dkk.2016.*Etika Politik*.Semarang:Widya Karya Press
- _____.2015.*Studi Masyarakat Indonesia*.Yogyakarta:Penerbit Ombak
- Huntington, Samuel. P dan M. Nelson.1997.Partisipasi Politik di Negara Berkembang.Jakarta:Rineka Cipta
- Imawan, Riswanda dkk.2003.*Menjadi Pemilih yang Baik dalam Pemilu 2004*.Program Studi Ilmu Politik, PPs Universitas Gadjah Mada
- Lindsay, L.L.1990.*Gender Roles: A Sociological Perspective*.New Jersey: Pentice
- Maran, Rafael Raga.2001.*Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta:Rineka Cipta
- Moleong, Lexi J.2007.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT Remaja Rosda Karya
- Panuju, Redi.2010.*Jago Lobi dan Negosiasi*.Yogyakarta:Interpreebook

- Philips, Anne.1995.*The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race*.Oxford: Oxford University
- Rush, Michael dan Philip Althoff.2000.Pengantar Sosiologi Politik.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Sahid, Komarudin.2011.*Memahami Sosiologi Politik*.Bogor:Ghalia Indonesia
- Sanit, Arbi.1997.*Sistem Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*.Jakarta:Rajawali Pers
- Sastroatmodjo, Sudijono.1995.*Perilaku Politik*.Semarang:IKIP Semarang Press.
- Setidi, Elly dan Kolip Usman.2013.*Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Soeharto.2009.*Makalah: Regulasi Demokrasi dalam Berpolitik*”.Pekalongan, 10 September 2009
- Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung:CV Alfabeta
- Surbakti, Ramlan.2010.*Memahami Ilmu Politik*.Jakarta: PT Gramedia Widiasmara
- Weimer, D.L. 1998.*Policy Analysis:Concept and practice*.New Jersey:Prentice-Hall, Inc.

Jurnal

- Arnstein,S.1969.A Leader of Citizen Participation.Vol. 35, No. Hal 216 - 224
- Ferdiana, Rahma dkk.2013.Kampanye Kader Perempuan Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kudus.*Unnes Civic Education Journal*.Vol.2.No.01.Hal: 16-24
- Fitriani, Dini.2015.Partisipasi Politik Perempuan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus DPC PDIP Kabupaten Pangandaran).*Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*.Bandung
- Haryati, Eri dkk.2017.Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS di Kabupaten Jepara).*Journal of Politic and Government Studies*.Vol.6.No. 04.Hal: 1-19
- Harnoko, Bambang Rudi.2012.Pendidikan Politik Perempuan dalam Konteks Negara Demokrasi.*Jurnal Muwazah*.Vol. 4. No. 2.Hal:228-243
- Haryanti dkk.2018.Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik.*Jurnal Civic: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol 15.No 1.Hal. 74 – 85

- Hughes, Melanie.M.2011. "Intersectionality, Quotas, and Minority Women's Political Representation Worldwide" *American Political Science Review* 106 (No.3): 602-615
- Lero, Desy Kharisni Jeni.2017.Perempuan dan Politik : Studi atas Peran Anggota Legislatif terhadap Faktor – Faktorr Minimnya Peluang Keterpilihan Caleg Perempuan sebagai Upaya untuk Meningkatkan Jumlah Keterpilihan Perempuan di DPRD Kota Kupang.*Tesis Universitas Kristen Satya Wacana*.Salatig
- Oakley, Ann. 2005.The Ann Oakley Reader: Gender, Women and Social Science. 1st ed., *Bristol University Press*,. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt1t88xpn.
- Mardhiah, Ainol dkk.2017.The Compositon of Woman Parliament Members Presence in Local Parliament in Aceh (A Case Study at Provincial Parliament of Aceh Province During the Priod of 2014 to 2019).*Proceedings of MICO MS 2017*. Vol 01. pp 295-301
- Marwah, Sofa.2016.Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015.*Jurnal Politik*.Vol 1. No 2.Hal. 264 – 281
- Moga, Samsinar Z.2017.Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Palu.*Asian Journal of Environment, History and Heritage*.Vol. 1.Issue 1.Hal: 169-178
- Sjahril, Sri Sumarni.2016.Politik Perempuan di Kota Makassar (Studi terhadap Peran Politik Perempuan Partai NasDem Kota Makassar).*Skripsi UIN Alauddin*. Makassar
- Susanti, Susi & Adelita Lubis.2015.Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan.*Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.Vol. 3.No. 1.Hal:1-13
- Sinulingga, Risnawaty.2006.Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Agama Kristen.*Jurnal Wawasan*.Vol. 12.No. 01.Hal: 47-53
- Walahe, Dewi.2018.Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Gorontalo.*Jurnal of Public Administration Studies*.Vol. 1.No. 1.Hal: 1-15

Sumber lain

<https://www.partainasdem.id/pages/sejarah-partai-nasdem> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 22.33 WIB

<https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 22.33 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 11.04

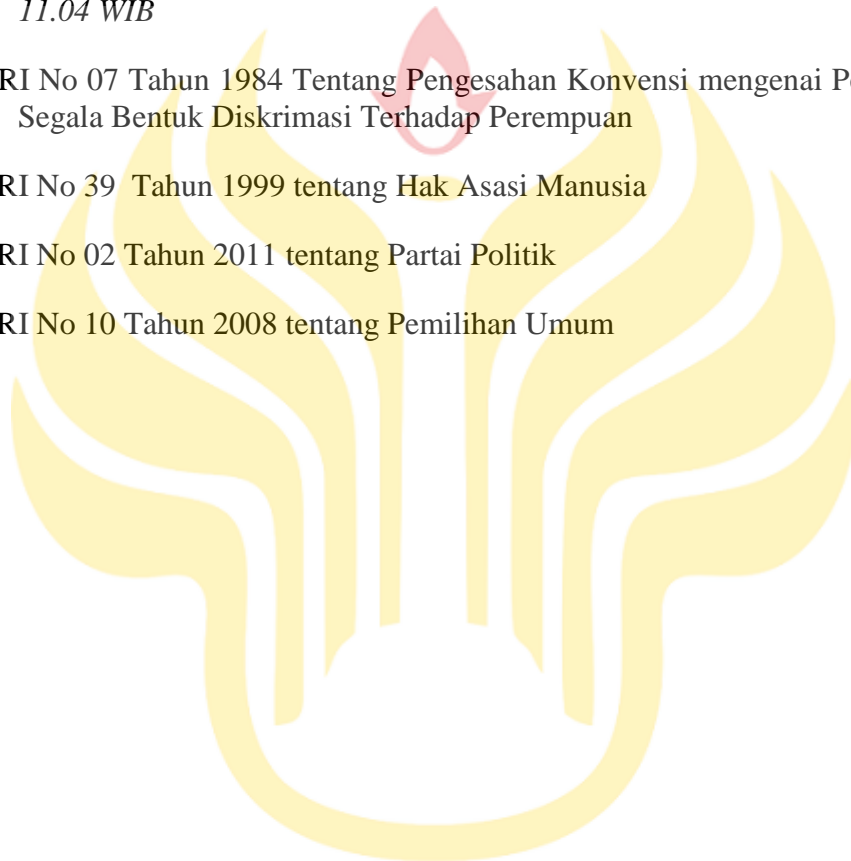
[wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem) diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 11.04 WIB

UU RI No 07 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi Terhadap Perempuan

UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU RI No 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik

UU RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG